

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FH UI, Jakarta.
- Ali, Zainuddin 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Autopo, Arisento Adi dan Adrianys Arif, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, CV Gitama Jaya, Jakarta.
- Efendi, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusumah, Hilman, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Tarsito, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2003, *Sejarah Pebentukan Undang-Undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Cetakan I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Naja, H.R Daeng, 2012, *Teknin Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Niewenhuis, J.H., 1985, *Hoofstukken Verbintenissenrecht*, Alih Bahasa oleh Djasadin Saragih, Surabaya.
- Parlindungan, A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah Indonesia (Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dilengkapi dengan PJPPAT PP Nomor 37 tahun 1998)*, CV Mandiri Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia: Sudut Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R.A, H.M. Ridwan Indra, 1996, *Ragam Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, CV. Trisula.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saragih, Djareng, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta.
- Soedjendro, J. Kartini, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Soerjopratikno, Hartono, 1995, *Aneka Perjanjian Jual Beli Cetakan 2*, PT Mustika Wikasa, Yogyakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani, Ridwan, 1995, *Aneka Perjanjian Jual Beli Cetakan 2*, PT Mustika Wikasa, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 2010, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2002, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reflement (HIR) (Staatsblad 1941-21, Staatsblad 1941-32 dan Staatsblad 1941-44).

Recht Reglement voor de Buitengewesten (RBg) (Staatsblad 1927-227).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847-23).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915-732).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...).

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Karya Ilmiah

Gusmi, “Akibat Hukum Pembatalan Akta PPAT oleh Mahkamah Agung”, Semarang, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNDIP, 2011.

Sitepu, Raymond Nata, “Pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Rap dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pdt/2015/PT.Mdn)”, Medan, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum USU, 2018.

D. Jurnal

Mokoagow, Areini Airin, “Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, *Lex Privatum*, Volume V, Nomor 4, Juni, 2017, hlm 20-21.

Rasyid, Laila M, “Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.Bj)”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VII, No. 2, November 2019, hlm. 5.

W, Lidya Christina, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm. 56-60.

E. Wawancara

Joko Supriyanto, 2021, Analisis Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 555/Pdt/2017/PT.Bdg), Yogyakarta, tanggal 11 Agustus.

Anthonio Irawan, 2021, Analisis Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 555/Pdt/2017/PT.Bdg), Yogyakarta, 09 Agustus.